

ANALISIS REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR

Siti Salsabila Putri Ajf¹, Khottob Idris², Fahri Irfarizki Siregar³, Toga Hotdianto Damanik⁴,
Pawer D. Panjaitan⁵

Universitas Simalungun

e-mail: putrisalsa151003@gmail.com¹, idriskhottop@gmail.com², rizkysiregar790@gmail.com³,
damaniktoga2@gmail.com⁴

Abstrak – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sistem akuntansi pemerintah adalah rangkaian sistematis dan prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan dilingkungan organisasi pemerintah. Dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis anggaran pendapatan dan belanja pemerintah Kota Pematang Siantar, dengan metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis data yang memiliki sifat deskriptif.

Kata Kunci: Anggaran, Pendapatan, Belanja Daerah

Abstract – The Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD), is the annual financial plan of local governments in Indonesia approved by the Regional House of Representatives. The APBD budget year covers a period of one year, starting from January 1 to December 31. The government accounting system is a series of systematic and procedures, organizers, equipment, and other elements to realize the accounting function from transaction analysis to financial reporting within the government organization. With the aim of knowing and analyzing the revenue and expenditure budget of the Pematang Siantar City government, the research method used is a data analysis method that has a descriptive nature.

Keywords: Budget, Revenue, Spending Area

PENDAHULUAN

Latar Belakang Perkembangan suatu negara untuk lebih maju dilaksanakan melalui pembangunan nasional secara terus menerus dan berkesinambungan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Salah satu bagian penting dari pembangunan nasional adalah pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi pada dasarnya mengoptimalkan peranan sumber daya dalam menciptakan kenaikan pendapatan pada sektor-sektor ekonomi dan mengusahakan tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan nasional yang dilaksanakan membutuhkan anggaran belanja pada setiap periode. Seiring dengan peningkatan pembangunan nasional maka anggaran belanja yang diperlukan juga semakin meningkat. Anggaran belanja tersebut dikumpulkan dari segenap potensi sumber daya dan pendapatan yang dimiliki oleh suatu daerah. Anggaran pendapatan dan belanja yang dikumpulkan dituang dalam suatu program atau rancangan pemerintah yang disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan dilingkungan organisasi pemerintah

Anggaran

Budidarma menjelaskan anggaran berasal dari kata budget (Inggris), sebelumnya dari kata bougette (Perancis) yang berarti “sebuah tas kecil”. Anggaran dalam arti luas

meliputi jangka waktu anggaran direncanakan, dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan. Anggaran dalam arti sempit meliputi rencana penerimaan dan pengeluaran dalam satu tahun saja. Penganggaran (budgeting) merupakan aktivitas mengalokasikan sumberdaya keuangan yang terbatas untuk pembiayaan belanja organisasi yang cenderung tidak terbatas. Anggaran sektor publik adalah rencana kegiatan dan keuangan periodik (biasanya dalam periode tahunan) yang berisi program dan kegiatan dan jumlah dana yang diperoleh (penerimaan/pendapatan) dan dibutuhkan (pengeluaran/ belanja) dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Analisis Pendapatan Daerah

Hariadi Pramono, Yanuar Restianto (2010:30) menyatakan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pememrintah daerah dituntut untuk memiliki kemandirian keuangan daerah yang lebih besar. Dengan tingkat kemandiraian yang lebih besar berarti daerah tidak akan lagi sangat tergantung pada bantuan dari pemerintah pusat dan propinsi melalui dana perimbangan. Namun tidak berarti kemandirian keuangan daerah tinggi sudah tidak memerlukan dana perimbangan. Dana perimbangan masi tetap diperlukan untuk mempercepat pembangunan daerah. Semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan maka daerah melakuakn pelyanan publik yang berkualitas, melakukan investasi pembengunan jangka panjang, dan sebagainya. Oleh karena itu perhatiannterhadap manajemen pendapatan dan analisis pendapatan daerah menjadi sangat penting bagi pemerintah daerah.

Analisis Belanja Daerah

Analisis belanja daerah sangat penting di lakukan untuk mengevaluasi apakah pemerintah daerah telah melakukan APBD secara ekonomis, efisien, dan efektif (value for money). Sejauh mana pemerintah daerah telah melakukan efisiensi anggaran, menghindari pengeluaran secara tidak perlu dan pengeluaran yang tidak tepat sasaran.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam studi ini adalah deskriptif kualitatif, untuk menjelaskan dan menganalisis Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pematang Siantar

Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini adalah metode analisis data yang memiliki sifat deskriptif. Metode ini digunakan untuk mengetahui gambaran tentang APBD pemerintah Kota Pematang Siantar T.A 2019-2022 dan membandingkan data yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut dengan landasan teori dari literatur kemudian menarik kesimpulan dari apa yang telah didapat dari penelitian tersebut dan memberikan beberapa saran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Pendapatan Daerah Kota PematangSiantar

Tabel 1. Pendapatan Daerah Kota Pematang Siantar

Tahun	Jumlah Rp (Rupiah)		Persentase (%)
	Anggaran Perubahan	Setelah Realisasi	
2019	1.047,45 M	1.005,08 M	95,95 %
2020	955,62 M	890,25 M	93,16 %
2021	887,92 M	898,12 M	101,15 %
2022	935,74 M	939,64 M	100,42 %

Sumber : <https://djpk.kemenkeu.go.id/>

Pada tabel 1. merupakan hasil penelitian tentang realisasi pendapatan daerah Kota Pematang Siantar (berupa, pendapatan asli daerah, dana perimbangan, lain-lain pendapatan daerah yang sah) selama periode tahun 2019-2022. Pemerintah Kota Pematang Siantar belum terlalu baik dalam merealisasikan pendapatan daerah. Selama periode tahun 2019-2022 realisasi pendapatan pemerintah Kota Pematang Siantar tidak mencapai jumlah yang telah dianggarkan. Presentase, tahun 2019 sebesar 95,95%, tahun 2020 sebesar 93,16%, tahun 2021 sebesar 101,15%, tahun 2022 100,42 %.

2. Belanja Pendapatan Kota Pematang Siantar

Tabel 2. Belanja Daerah Pemerintah Kota Pematang Siantar

Tahun	Jumlah (Rp)	Rupiah	Presentase (%)
	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	
2019	1.068,34 M	934,78 M	87,5 %
2020	1.046,24 M	911,99 M	87,17 %
2021	920,35 M	876,64 M	95,25 %
2022	999,03 M	885,65 M	88,65 %

Sumber : <https://djpk.kemenkeu.go.id/>

Pada tabel 2. merupakan hasil penelitian Analisis Varians Pendapatan Kota Pematang Siantar periode tahun 2019-2022 5 tentang realisasi belanja daerah Kota Pematang Siantar (berupa, belanja tidak langsung, dan belanja langsung). Kota Pematang Siantar sudah dikatakan baik dalam merealisasikan belanja daerahnya. Dilihat dari realisasi belanja daerah Kota Pematang Siantar tidak melebihi dengan jumlah yang dianggarkan. Presentase tahun 2019 sebesar 87,5%, tahun 2020 sebesar 87,17 %, tahun 2021 sebesar 92,25%. Tahun 2022 88,65%.

3. Analisis Rasio Derajat Desentralisasi Kota Pematang Siantar

Tabel 3. Analisis Rasio Derajat Desentralisasi Kota Pematang Siantar

Tahun	PAD (Rp)	Total Pendapatan Daerah	Presentase (%)
2019	119,60 M	1.005,08 M	8,40%
2020	118,95 M	890,25 M	7,48%
2021	115,86 M	898,12 M	7,75%
2022	136,07 M	939,64 M	6,90%

Sumber : <https://djpk.kemenkeu.go.id/>

Tabel 3. menyatakan bahwa derajat desentralisasi Kota Pematang Siantar dapat dikatakan masih rendah. Tingkat derajat desentralisasi pada tahun 2019 sebesar 8,40%, tahun 2020 sebesar 7,48%, tahun 2021 sebesar 7,75%. Tahun 2022 6,90%. Tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah Kota Pematang Siantar untuk menggali dan mengolah pendapatan masih dikatakan rendah.

4. Rasio Efektivitas Pajak Daerah Kota Pematang Siantar

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase (%)
2019	45,82 M	53,80 M	117,43 %
2020	50,88 M	47,63 M	93,61 %

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase (%)
2021	53,10 M	59,27 M	111,62 %
2022	68,20 M	76,81 M	112,62 %

Sumber : <https://djk.kemenkeu.go.id/>

Tabel 4. diatas dapat dilihat rasio efektivitas pajak daerah yaitu tahun 2019 Sebesar 117,43%, tahun 2020 sebesar 93,61 %, tahun 2021 sebesar 111,62% , tahun 2022 112,62%. Presentase diatas pemerintah Kota Pematang Siantar cukup efektif dalam merealisasikan pajak daerahnya yaitu pada tahun 2019,2021 dan 2022 melebihi dengan jumlah yang dianggarkan. Sedangkan pada tahun 2020 tidak efektif dalam merealisasikan pajak daerah.

5. Belanja Langsung Kota Pematang Siantar

Tahun	Belanja Langsung (Rp)	Total Belanja (Rp)	Presentase (%)
2019	995,4 M	887,99 M	112,09%
2020	972,79 M	813,33 M	119,60%
2021	769,32 M	780,43 M	98,57%
2022	878,09 M	838,71 M	104,69%

Sumber : <https://djk.kemenkeu.go.id/>

Tabel 5. belanja langsung Kota Pematang Siantar(berupa belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal) dengan presentase tahun 2019 sebesar 112,09 %, tahun 2020 sebesar 119,60%, tahun 2021 sebesar 98,57% dan tahun 2022 104,69 %. Dan dari empat tahun penelitian tersebut sebagian besar dana dialokasikan untuk belanja modal.

6. Belanja Tidak Langsung Daerah Kota Pematang Siantar

Tahun	Belanja Tidak Langsung (Rp)	Total Belanja (Rp)	Presentase (%)
2019	626,09 M	551,46 M	113,53%
2020	646,57 M	536,52 M	120,51%
2021	571,03 M	538,46 M	106,04%
2022	598,14 M	476,47 M	125,53%

Sumber:<https://djk.kemenkeu.go.id/>

Tabel 6. belanja tidak langsung Kota Pematang Siantar (berupa belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan social, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga) dengan presentase tahun 2019 sebesar 113,53%, tahun 2020 sebesar 120,51%, tahun 2021 sebesar 106,04% tahun 2022 125,53%% Dan dari empat tahun penelitian tersebut sebagian besar dana dialokasikan untuk belanja pegawai.

7. Rasio Efisiensi Belanja Kota Pematang Siantar

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase (%)
2019	1.068,34 M	934,78 M	87,5 %
2020	1.046,24 M	911,99 M	87,17 %
2021	920,35 M	876,64 M	95,25 %
2022	999,03 M	885,65 M	88,65%

Sumber : <https://djk.kemenkeu.go.id/>

Data diatas dapat dikatakan bahwa pemerintah Kota Pematang Siantar dapat mengendalikan belanja daerahnya dengan tidak ada pemborosan dana. Dengan presentase tahun 2019 87,5% tahun 2020 87,17% tahun 2021 95,25% tahun 2022 88,65%.

KESIMPULAN

Hasil penelitian telah didapat dan disimpulkan, bahwa Realisasi Kinerja pendapatan daerah pemerintahan Kota Pematang Siantar dilihat dari sisi pendapatan dengan menggunakan analisis varians tahun 2019-2022 dapat dikatakan kurang baik, karena realisasinya tidak mencapai jumlah yang dianggarkan. Realisasi tahun 2019 sebesar 1.005,08 M, tahun 2020 sebesar 890,25 M, tahun 2021 sebesar 898,12 M, tahun 2022 939,64 M, dan tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pematang Siantar dapat dikatakan masih rendah. Ini berarti pemerintah Kota Pematang Siantar masih kurang memberikan perhatian dalam mengelola dan menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang ada di Kota Pematang Siantar Pajak daerah Kota Pematang Siantar dapat dikatakan baik karena selalu melebihi jumlah yang dianggarkan setiap tahunnya. Berarti pemerintah Kota Pematang Siantar cukup efektif dalam merealisasikan pajak daerah dan bisa berdampak baik bagi pendapatan daerah. Realisasi Kinerja belanja pemerintah Kota Pematang Siantar dilihat dari analisis varians secara umum dapat dikatakan baik karena tidak melebihi dari jumlah yang dianggarkan. Ini berarti kinerja belanja Kota Pematang Siantar dapat dikatakan terealisasikan dengan baik. Presentase tahun 2019 sebesar 934,78 M, tahun 2020 sebesar 911,99 M, tahun 2021 sebesar 876,64 M dan tahun 2022 sebesar 885,65 M. Keserasian belanja daerah Kota Pematang Siantar, sebagian besar dana pemerintah dialokasikan untuk belanja tidak langsung dibandingkan dengan belanja langsung. Belanja pegawai mendapat alokasi dana terbanyak selama periode tahun penelitian. Kinerja keuangan Kota Pematang Siantar cukup baik dengan dalam mengendalikan belanja daerahnya. Dengan presentase tahun 2019 sebesar 87,5% tahun 2020 sebesar 87,17 % tahun 2021 sebesar 95,25%. Tahun 2022 sebesar 88,65%.

DAFTAR PUSTAKA

- <http://prp2sumut.sumutprov.go.id/kabupaten-kota-detail2022/S1AxbDRaZDNaa3RCMTdIUVA1RIIzUT09>
- <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/12022>
- <https://media.neliti.com/media/publications/327977-analisis-kinerja-pengelolaanpendapatan-595a4601.pdf>
- <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/1319>
- <https://m.mediaindonesia.com/nusantara/541185/apbd-pematang-siantar-2023disepakati-sebesar-rp955-miliar>
- <https://sumut.antaranews.com/berita/553965/apbd-kota-pematang-siantar-tahunanggaran-2024-rp1-triliun-lebih>
- <https://siantarkota.bps.go.id/subject/13/keuangan.html>
- <https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2019/06/Ringkasan-APBD-TA2017.pdf>
- <https://sumut.bps.go.id/indicator/13/723/1/realisasi-pengeluaran-pemerintah-kotapematangsiantar.html>